

PERAN ELIT LOKAL DALAM SOSIALISASI DAN MOBILISASI POLITIK PADA MASA TRANSISI DEMOKRASI

Ridhah Taqwa¹, Sunyoto Usman²

¹Program Studi Magister Sosiologi Unsri, Email: ridhotaqwa@fisip.unsri.ac.id.

²Program Doktor Politik Islam, UMY, sunyoto.usman@umy.ac.id

ABSTRAK

Praktik demokrasi dalam pemilu memiliki arti penting, karena dapat menjadi referensi kematangan berdemokrasi era reformasi. Pada arus local, praktik demokrasi sangat ditentukan oleh peran elit lokal dalam proses sosialisasi dan mobilisasi politik. Elit yang berperan adalah elit birokrasi, kepala kampung, pensiunan TNI, serta elit agama. Elit birokrasi menggalang dukungan dari PNS dan keluarganya, sedangkan kepala kampung memanfaatkan keluarga dan kliennya. Elit militer, selain keluarga inti juga client. Hasil penelitian menunjukkan elit agama berkolaborasi tokoh agama di kota memanfaatkan sentiment nilai keagamaan massa santri. Interaksi elit politik kota dan elit lokal bersifat timbal balik, sedangkan elit lokal dan massa bersifat satu arah. Jadi, elit lokal sebagai opinion leader menjadi broker antar elit kota dan massa. Temuan lain pola sosialisasi dan mobilisasi politik sangat tergantung pada kepentingan dan afiliasi politik elit. Pada akhir Orde Baru mobilisasi politik ke Partai Pemerintah sangat kuat, sedangkan pada awal reformasi sudah mengalami pergeseran pada partai berbasis agama, walaupun belum sepenuhnya berubah drastis. Mobilisasi politik yang memanfaatkan instrumen kebijakan pembangunan era Orde Baru ternyata masih berlangsung pada awal Orde Reformasi. Metode penelitian menggunakan tipe kualitatif deskriptif dengan pendekatan konstruktivis, yaitu berfokus peran elit dan aktor-aktor politik desa dengan wawancara mendalam selama 1 bulan, analisis data juga dengan kualitatif deskriptif.

Kata kunci: Peran elit; Sosialisasi; Mobilisasi politik; Elit lokal; Transisi demokrasi

1. PENDAHULUAN

Fenomena politik akhir era orde baru dan awal era reformasi merupakan pembelajaran berharga bagi praktik demokrasi di Indonesia. Pada masa itu, di satu sisi ada ruang kebebasan untuk berdemokrasi melalui pemilu, sedangkan di sisi lain masih tersisa pula praktik demokrasi dengan cara mobilisasi massa. Praktik demokrasi dengan mobilisasi massa ini telah berlangsung puluhan tahun selama kekuasaan orde baru sehingga tidak mudah dihilangkan. Proses itu terutama berlaku bagi masyarakat desa santri (Geertz, 1984) yang masih cukup jauh dari iklim kebebasan politik. Selain itu, elit-elit lokal pun masih memainkan pengaruhnya, baik dalam proses sosialisasi politik maupun mobilisasi politik untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Selain penjelasan elit lokal dalam praktik demokrasi pada tataran komunitas santri (Taqwa, 2004), dimensi proses politik lain berupa sosialisasi dan mobilisasi politik juga penting artinya dalam konteks pemilihan umum di era transisi demokrasi. Bagaimanapun keputusan pemilih untuk memilih salah satu partai dalam pesta demokrasi tidak terlepas dari kedua proses tersebut. Sosialisasi nilai-nilai yang sudah tertanam sedemikian rupa akan menjadi dasar pertimbangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan politik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Duverger (2002) bahwa hubungan atau tindakan sosial, termasuk dalam memilih partai, tidak saja didasarkan pada fakta positif tetapi pada pertimbangan nilai. Demikian pula

mobilisasi politik yang menjadi model penguasa untuk mendorong warga berpartisipasi dalam politik, tentu saja memiliki standar nilai tersendiri yang didasarkan pada cita-cita sosial dan ekonomi. Dalam konteks inilah kemudian dimensi sosialisasi dan mobilisasi politik yang umumnya masih berlaku bagi negara-bangsa yang sedang mengembangkan demokrasi menjadi penting dibahas secara terpisah.

Sebelum sampai pada pembahasan hal di atas, diawali identifikasi elit-elit yang berpengaruh dan atau memegang posisi strategis di tiga komunitas santri ini, termasuk hubungan antara kelompok elit tersebut. Selanjutnya akan diuraikan bagaimana pola sosialisasi dan mobilisasi politik yang berkembang dalam periode tertentu, terutama yang melibatkan elit lokal sebagai broker. Bagaimanapun juga sosialisasi dan mobilisasi politik tidak terpisahkan dengan elit yang lebih besar (di kota) yang mempunyai kepentingan politik untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian elit lokal menjadi penting dan strategis, selain karena elit lokal itu sendiri juga memiliki kepentingan sosial politik tersendiri.

Output penelitian ini dapat menjadi cermin tentang bagaimana masyarakat lokal merespon situasi politik yang secara struktural telah berubah, namun secara kultur politik masih mengikuti pola lama, khususnya berupa mobilisasi politik. Dalam konteks itulah, maka pertanyaan mendasar yang akan dijawab adalah bagaimana peran elit lokal dalam sosialisasi dan mobilisasi politik pada pemilu awal era reformasi yang juga merupakan masa transisi demokrasi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa yang jauh dari pusat kota, tepatnya 320 KM dari Kota Makassar. Penelitian dilakukan 3 tahun se usai pemilu perdana era reformasi di Desa Pinang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Selanjutnya dalam penguraian hasil penelitian akan mengikuti pembagian desa yang terdiri dari 3 Komunitas, yaitu: Binanga I, Binanga II dan Binanga III. Ketiga dusun ini merepresentasikan peran utama elit lokal yang berbeda pula.

Penelitian ini secara kualitatif deskriptif dengan pandangan atau perspektif konstruktivis (Creswell, 2012; 11). Karena itu merupakan penelitian deskriptif mendalam (Neuman, 2013; 465), maka pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Informan sejumlah elit yang merepresentasi semua kategori elit lokal, baik elit agama, ekonomi dan birokrasi serta elit adat. Mereka dipilih secara sengaja dengan sejumlah kriteria, seperti dikenal luas, memiliki modal sosial dan berpengaruh dalam masyarakat. Informan didatangi langsung ke kediaman atau tempat kerja selama penelitian berlangsung. Hasil wawancara dianalisis dan selanjutnya diinterpretasi secara tematis atau konteks (Creswell, 2012; 279).

3. ANALISIS DATA

Masyarakat pedesaan yang masih menganut budaya paternalistik atau patron-client di Sulawesi Selatan (Putra, 1988), menjadi lahan yang subur untuk memanfaatkan elit lokal dalam rangka mensukseskan suatu agenda atau kebijakan politik, khususnya politik praktis (Usman, 1990). Salah satu aspek politik yang dimaksud adalah sosialisasi dan mobilisasi politik yang melibatkan elit politik sebagai aktor utama, khususnya dalam praktik demokrasi. Dalam proses politik tersebut peranan elit pada tataran lokal menjadi mediator antar elit politik tingkat tinggi dengan massa, akar rumput (*grass-root*). Dalam posisi seperti inilah maka teori *two-step flow of information* menemukan tempatnya (Lipset, 1995). Teori ini menyatakan bahwa massa lebih banyak menerima informasi dari elit pada aras lokal, dari pada elit politik tertinggi. Intensitas komunikasi politik antar elit lokal dan massa cukup tinggi, karena mereka bergaul setiap saat, sehingga akses informasi dari dan ke elit lebih intens pula. Dalam kerangka itulah maka format politik orde baru yang sentralistik dan monolitik memberi jalan yang luas bagi dominasi peran elit. Demikian pula, sosialisasi ide perjuangan politik dari tokoh politik disalurkan atau

dikomunikasikan oleh elit lokal yang menjadi penghubung antara elit politik di kota dengan massa (komunitas muslim). Berangkat dari pemikiran itu maka peranan elit, baik dalam mensosialisasikan ide-ide perjuangan politik Islam, maupun dalam memobilisasi massa untuk kepentingan politik praktis menjadi penting.

Setidaknya ada 4 jenis elit yang akan menjadi kata kunci dalam pembahasan ini, yaitu elit adat, elit agama dan elit politik-pemerintahan, dan elit ekonomi (Walinono, 1979). Namun untuk lebih menyesuaikan situasi dan kondisi dengan komunitas muslim yang menjadi objek penelitian ini, maka pengelompokan elit dikelompokkan menjadi 6 macam. *Pertama*, elit adat yaitu mereka yang memiliki keahlian atau mistifikasi dan disertai gelaran yang kemudian dihormati oleh masyarakat. *Kedua*, elit birokrasi bagi yang berlatar belakang PNS yang memiliki berpengaruh atau reputasi. *Ketiga*, penguasa lokal berlaku bagi kepala kampung atau lingkungan yang karena kedudukannya sehingga memiliki pengaruh yang luas. *Keempat*, elit militer menunjuk pada pensiunan militer yang karena status itu sehingga memiliki pengaruh dan jaringan dengan struktur teritorial TNI. Sedang *kelima*, kalangan pengusaha yang karena usaha dan kekayaannya sehingga memiliki pengaruh dalam masyarakat. Terakhir *keenam*, elit agama bagi mereka yang karena keahliannya dan fungsinya dalam kegiatan sosial keagamaan, sehingga dikategorikan sebagai elit. Elit ini tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah dan NU, tetapi juga yang tidak berafiliasi dengan ormas tetapi memiliki keahlian dan kapasitas di bidang keagamaan. Karena adanya perbedaan latar belakang ini, maka potensial melahirkan perbedaan orientasi politik masing-masing elit, berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai yang diyakini elit tersebut (Almond dan Verba, 1984).

Perbedaan elit ini masing-masing memiliki basis yang berbeda pula, sesuai dengan karakteristik komunitas tersebut. Elit agama lebih dominan di Binanga I yang juga merupakan komunitas santri, Elit adat di Binanga II yang masih kental dengan budaya abangan (tradisi lama-sinkretik), dan elit Indonesia-birokrasi lebih dominan di Binanga III yang merupakan masyarakat *semi urban* atau memiliki kedekatan dengan budaya priyayi. Dan memang sebagian besar para birokrat di Indonesia merasa lebih tinggi kedudukannya dari masyarakat lainnya (Gaffar, 1999;107). Walaupun demikian, pengelompokan itu tidak bersifat mutlak, karena sebagian besar di antara para elit di atas memiliki status ganda. Ada beberapa elit elit agama misalnya juga bekerja di birokrasi pemerintah (PNS). Demikian pula, ada tokoh agama yang juga merangkap sebagai kepala kampung. Untuk kasus seperti ini penentuan elit didasarkan pada status yang paling dominan pengaruhnya dalam hubungannya dengan masyarakat.

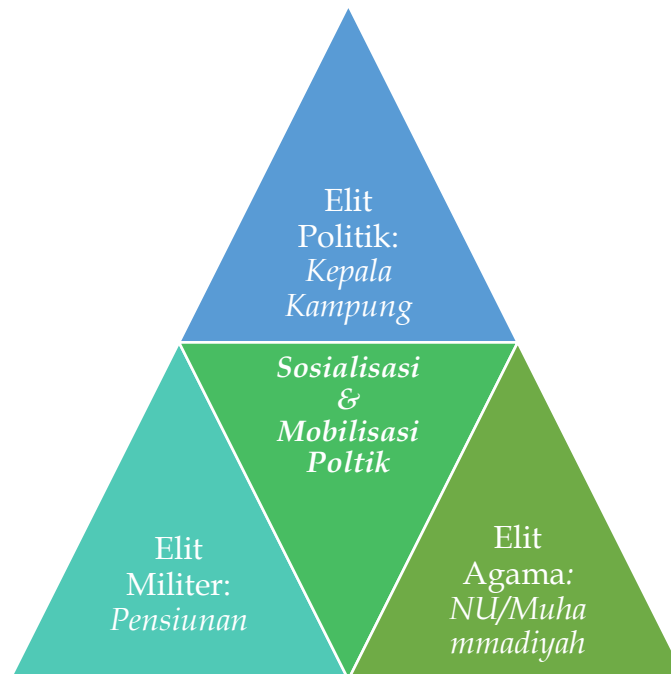
Namun demikian untuk situasi tertentu, elit birokrasi tentu saja tetap dominan dalam kehidupan politik di Binanga I dan Binanga II. Hanya saja pada komunitas ini, elit birokrasi tetap terimbangi oleh elit agama dan adat dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Fenomena itu relevan dengan teori dualisme tipe utama elit politik yaitu *established elite* yang mengambil inisiatif dan mengimplementasikan kebijakan; dan counter elit atau pihak oposisi yang mencoba menolak kebijakan (Higley dalam Lipset, tt). Yang pertama diperankan oleh penguasa lokal atau kepala kampung, sedangkan kedua oleh elit agama, adat, pensiunan TNI, dan pengusaha, serta birokrasi. Namun demikian ketiga kampung ini memiliki counter elit yang berbeda-beda tingkat pengaruhnya. Selanjutnya gambaran struktur elit di ketiga komunitas santri ini diuraikan secara terpisah kemudian diperbandingkan antara satu dengan yang lain.

3.1. Binanga I: Elit Agama-Militer-Kepala Kampung

Dinamika sosial politik di Kampung Binanga I banyak diwarnai tiga pihak kelompok elit yaitu elit agama, kepala kampung (penguasa lokal) dan pensiunan militer. Kepala kampung dan militer lebih cenderung melakukan mobilisasi politik untuk mempengaruhi massa, termasuk menekan sesuai dengan kehendak politiknya. Elit agama, terutama dari kalangan Muhammadiyah terutama berperan melakukan sosialisasi politik yang bernuansa Islam.

Sementara kepala kampung yang sebelumnya pro partai Islam, kemudian beralih ke Golkar pada pertengahan tahun 1980-an juga melakukan peran mobilisasi politik, selain sosialisasi. Peran elit agama juga pada saat tertentu melakukan mobilisasi, namun lebih terbatas karena sumberdaya yang digunakan pun terbatas.

Figure 1. Posisi Elit Lokal Dominan di Binanga I



Sumber: Diolah dari data Primer, 2002.

Ketiga pihak dalam melakukan sosialisasi dan terutama mobilisasi masing-masing punya jaringan dan agen di kota yang berbeda pula latar belakangnya. Elit agama sebagai penghubung antara elit partai di kota lebih memanfaatkan sentimen keagamaan dan pengusaha yang mendukung PPP. Sebaliknya penguasa lokal lebih mengandalkan ideologi pembangunan melalui struktur birokrasi pemerintah di atasnya, mulai dari camat sampai bupati. Sedangkan militer lebih pada pendekatan keamanan melalui jaringan organisasi teritorial (koramil dan kodim). Intensitas pengawasan dari militer terutama ketika suhu politik meningkat seperti sebelum dan sesudah pemilu. Karena itu, keberadaan pensiunan militer ini penting diperhitungkan sebagai salah satu pilar dalam Golkar. Fungsi aparat keamanan untuk mengontrol masyarakat yang tetap berlangsung walau sudah pensiun, diakui salah seorang pensiunan TNI berikut.

Mayor (pur) Y. Hmd (79) seorang pensiunan militer yang beristri orang Binanga I. Sebelum pensiun tahun 1964, pernah bertugas dalam DOM untuk menumpas DI/TII di wilayah Sultra dan menetap di daerah itu hingga tahun 1967. Pada tahun yang sama mulai menetap di Binanga I. Sejak itu dia selalu berkoordinasi dengan pejabat pemerintah dan militer tentang kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Galonta (sekarang dimekarkan menjadi 5 desa/lurah). Dia mengaku sebagai intelijen dan memberikan laporan secara periodik kepada pemerintah, khususnya kodim. Tahun 1972-1973 menjabat sebagai kepala kampung (lingkungan), namun dilengserkan oleh masyarakat karena tidak senang dengan kepemimpinannya yang otoriter dan militeristik. Buktinya banyak warga yang merantau ke Malaysia dan Irian serta ke Pinrang membuka lahan dan tinggal dalam waktu yang lama karena

alasan politik. Kemudian atas prakarsa elit agama dan ormas Islam dia dipetisi warga sehingga ia diberhentikan oleh pemerintah daerah, dan kemudian digantikan oleh saudara iparnya (Abd. Hamid) yang juga ketua Parmusi.

Salah satu bukti korban misi intelijen dari pensiunan militer tersebut adalah Abd. Gaffar. Ia adalah seorang mubaligh yang berapi-api dalam setiap khutbah atau ceramahnya di Binanga I. Hal ini diuraikan dalam ilustrasi berikut.

Gfr. GG. (63), mantan tentara DI/TII dan calon legislatif pada pemilu 1987 pernah dibawa ke markas Koramil disiksa beberapa hari tanpa melalui proses hukum. Kejadian itu menjelang pemilu tahun 1982 atas laporan masyarakat (pensiunan TNI). Dia dituduh menyinggung pemerintah dan dinilai menganut paham Islam fundamentalis ketika berceramah secara berapi-api di Masjid. Setelah diurus oleh anggota DPRD Kabupaten dari Fraksi PPP baru ia dibebaskan dari tahanan beberapa hari kemudian.

Meskipun kelompok elit militer dan agama masing-masing memiliki pengaruh, namun yang paling dominan adalah elit politik (kepala kampung). Sedangkan pensiunan pengaruhnya terutama dikalangan yang memiliki hubungan kerabat saja, padahal kerabat dekatnya itu umumnya tokoh Muhammadiyah yang merupakan elit agama. Karena itu pengaruhnya untuk menggiring ke Golkar sangat terbatas, mengingat mereka merupakan pendukung utama partai Islam (PAN) pada era reformasi.

Yang menarik bahwa ketiga kelompok elit tersebut menjadikan masjid sebagai arena pertarungan politik. Hal ini memungkinkan karena para elit tersebut sama-sama aktif menghadiri shalat jamaah, sehingga peluang bertemu dengan masyarakat di masjid semakin besar. Selain itu, mereka sering memanfaatkan ceramah sesudah shalat wajib, khususnya *ba'da* shalat jumat dan magrib untuk mengeluarkan pendapat, sikap dengan saling mengecam antara satu dengan yang lain. Usaha memobilisasi massa untuk mendukung partai tertentu dalam pemilu juga menjadi arena para elit untuk memperkuat basis kekuasaannya. Karena bagi penguasa lokal, dukungan pada partai pemerintah yang berkuasa menjadi indikator kekuasaan dan kepercayaan elit di atasnya. Semakin bulat suatu komunitas mendukung suatu partai, menjadi ukuran tingkat pengaruh dari elit tersebut. Demikian pula bagi oposisi elit penguasa, semakin kuat beroposisi dengan penguasa lokal, semakin tinggi pula taraf ketelitiannya. Pertentangan antara elit lokal di komunitas ini terkadang harus diselesaikan oleh aparat keamanan, dan sebagian yang lain berakhir dengan rekayasa tindak kriminal berupa pencurian ternak sapi. Contohnya pernah dialami oleh Abdul Hamid.

Abd. Hamid (73) mantan pejabat kepala lingkungan tahun 1970-an. Pernah kehilangan 5 ekor sapi di kebun. Motif pencurian diyakini sebagai balas dendam atas ucapannya di depan masjid yang mengatakan hanya setan yang mendukung Golkar, karena lambang pohon beringin yang merupakan simbol kemusyrikan dimana banyak orang memandang sebagai pohon keramat. Karena kepala kampung tersinggung atas ucapan itu, sehingga merekayasa atau tepatnya memfasilitasi pencurian sapi atas sepengetahuan bekangnya atau elit politik di kota Enrekang. Sampai sekarang sapi itu tidak diketahui ujung pangkalnya.

Peristiwa ini menjadi cermin, betapa konflik terbuka karena perbedaan afiliasi politik bisa berakibat fatal, tanpa masyarakat mampu mengatasinya. Bahkan kepala kampung yang seharusnya menjadi pelindung justru memfasilitasi tindak kriminal bermuatan politik itu. Hal ini tampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi para elit penguasa di kawasan pemukiman Sungai Sadding. Hal yang sama pernah dialami salah seorang warga di Binanga II se usai pemilu 1987. Meskipun menjelang pemilu 1999, tepatnya sekitar tahun 1998 kepala kampung yang telah puluhan tahun berkuasa dilengserkan oleh warga, terutama dari aktivis Muhammadiyah. Namun pengaruh elit politik yang mempunyai jaringan luas ini, masih tampak pada pemilu 1999. Dia masih aktif mendorong warga untuk tetap konsisten dengan Golkar dengan dalih

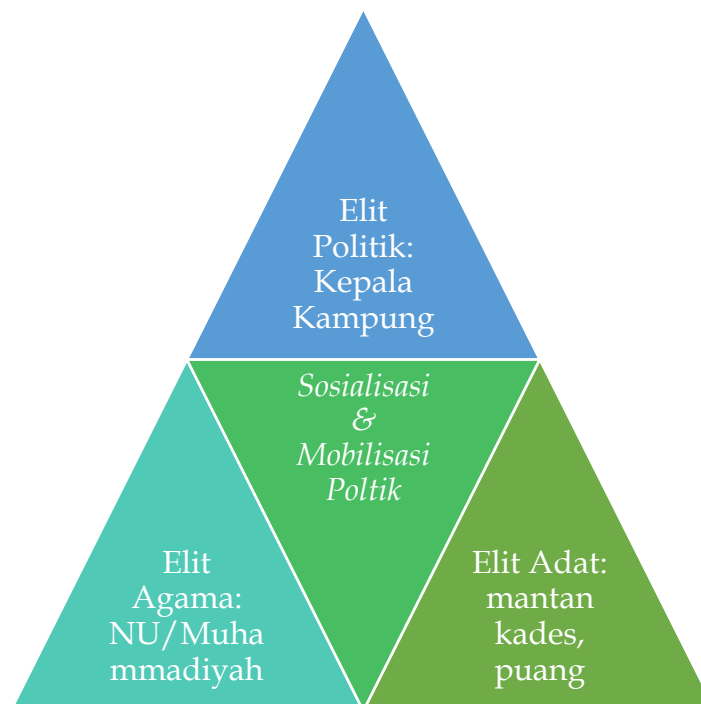
hasil-hasil pembangunan orde baru. Bahkan ketika pemilihan kepala kampung pun masih aktif mendukung calon non-Muhammadiyah. Mobilisasi dukungan itu tidak terlepas dari permusuhan yang berkepanjangan dengan para aktivis Muhammadiyah dan PAN.

Tampaknya mobilisasi politik di Binanga I, yang dimotori oleh elit penguasa lokal tidak hanya dipahami sebagai perintah dari elit politik kota, tetapi terutama karena adanya persaingan antara elit lokal. Karena itu, ada kecenderungan kepentingan elit politik di kota hanya menjadi instrumen untuk saling melawan demi mempertahankan kepentingan elit lokal tersebut. Dengan demikian, para elit lokal yang saling berlawanan itu menumpangkan kepentingan politiknya pada situasi atau sistem politik orde baru yang menghalalkan kekerasan. Dengan proses politik seperti ini, kepentingan politik patron (elit kota dan lokal) semuanya terakomodasi.

3.2. Binanga II: Elit Adat-Militer-Kepala Kampung

Berbeda dengan Binanga I, elit lokal di Binanga II selain penguasa lokal dan pensiunan militer juga elit adat. Karena itu gelaran bagi elit terakhir ini masih sering digunakan yaitu gelar *puang*. Para elit adat ini mampu menjadi penyeimbang bagi kedua kelompok elit tersebut, sehingga integritas komunitas muslim di tempat ini lebih terjaga. Persaingan antar elit dalam memobilisasi massa bersifat tidak terbuka, sehingga tidak terlalu nampak usaha memobilisasi massa untuk mengcounter penguasa lokal dalam mendukung partai yang sedang berkuasa, terutama pada pemilu 1997. Di Kunyi (salah satu dusun dalam lingkungan Binanga II) misalnya, persaingan antar elit lokal pendukung PPP dan Golkar masih banyak mewarnai dinamika politik pada pemilihan umum 1999 lalu. Di Komunitas ini para elit agama dari kalangan Muhammadiyah masih tetap mendukung PPP, sedang mantan Kepala Desa pada tahun 1970-an –1980-an dan keluarganya tetap konsisten mendukung Partai Golkar. Selanjutnya gambaran ketiga elit dominan di Binanga II dideskripsikan dalam bentuk figur berikut.

Figure 2. *Posisi Elit Lokal Dominan di Binanga II*



Sumber: Diolah dari data Primer, 2002.

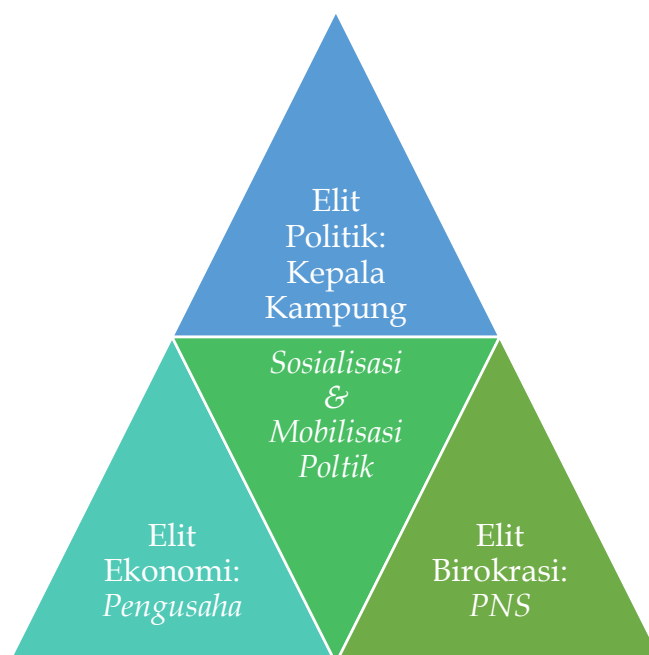
Selain kepala kampung, elit adat cukup dominan di komunitas yang masih tradisional dan cenderung abangan ini. Elit adat ini termasuk juga mantan kades pada tahun 1970-an sampai 80-an yang mempunyai sejumlah pengikut (client). Namun demikian para elit adat ini tidak semuanya mendukung Golkar, ada pula sebagiannya yang mendukung PKB dan PPP. Demikian pula elit agama ada ke PKB ada ke PAN dan Golkar. Namun demikian perbedaan dukungan itu, tidak banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hal ini berbeda dengan Binanga I yang sarat dengan konflik, baik politik maupun sosial keagamaan. Komunitas Binanga II yang tidak senang dengan suasana konflik yang berkepanjangan itu yang paling dominan memotivasi untuk memisahkan diri dalam berbagai urusan dengan Binanga I. Pertama dalam urusan kehidupan agama, awalnya mereka menyelenggarakan Ibadah Jumat kemudian belakangan juga ibadah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu dalam urusan pemerintahan mereka membentuk lingkungan kampung tersendiri. Perubahan ini dimungkinkan karena kebijakan pemekaran desa dan kampung yang luas, apalagi antara Binanga I dan Binanga II dipisahkan Sungai Saddang.

Para elit lokal di Binanga II ini lebih fleksibel untuk memberikan kebebasan politik pada warganya. Justru mantan kepala kampung Binanga I yang puluhan tahun berkuasa yang banyak mempengaruhi warga untuk tetap memilih Golkar, walaupun yang ia telah lengser dari jabatannya atas desakan dari kalangan elit agama dan Kepala Kecamatan Enrekang. Seperti diakui oleh Hasanuddin, kepala kampung bahwa kemenangan Golkar karena pengaruh *Papa'* (sebutan mantan kepala kampung Binanga I) yang mendorong warga untuk memilih Golkar.

3.3. Binanga III: Pengusaha-Birokrat-Kepala Kampung

Sesuai dengan cirinya yang lebih modernis-semi urban, komunitas muslim Binanga III lebih didominasi kalangan pengusaha-birokrat dan pensiunan militer selain kepala kampung. Jika sebelumnya yang menjadi kepala kampung selama puluhan tahun dari militer, kini dipegang oleh sipil yang juga aktivis muhammadiyah. Kepala kampung ini masih menantu dari kepala kampung sebelumnya. Walaupun demikian pengaruh pensiunan militer tidak dominan lagi pada pemilu 1999, namun untuk beberapa kasus masih berpengaruh (Taqwa, 2010).

Figure 3. *Posisi Elit Lokal Dominan di Binanga III*



Sumber: Diolah dari data Primer, 2002.

Elit birokrasi maupun elit ekonomi (pengusaha) sama-sama melakukan mobilisasi politik untuk memilih Golkar. Sedangkan kepala kampung tampaknya bersifat *ambigu*, karena pada pemilu 1997 baru menjabat kepala kampung dan berstatus PNS, sehingga turut pula mendorong warganya untuk memilih Golkar. Tetapi pada era reformasi, dia justru menjadi salah satu pendiri dan pengurus PAN tingkat Kabupaten Enrekang, sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah tentang larangan bagi PNS aktif dalam partai politik. Gambaran posisi elit dominan dan peranan dalam komunitas muslim di Binanga III dideskripsikan dalam diagram berikut (Figure 3).

Antara pengusaha dan birokrat di sini meskipun berbeda profesi, namun orientasi politiknya sama, yaitu Golkar. Kalau birokrat, memang sudah sejak awal berafiliasi ke Golkar. Para pengusaha ini lebih mengandalkan proyek dari pemerintah sehingga dengan sendirinya harus mendukung Golkar. Mereka merupakan pengusaha *plat merah* karena lebih banyak mengandalkan proyek dari pemerintah, ketimbang berusaha sendiri. Selain karena kapasitasnya sebagai pengusaha, ada juga pengusaha yang melekat padanya sebagai tokoh adat dan bergelar *puang*. Namun anak-anaknya yang menjadi pengusaha angkutan, kontraktor dan bengkel juga masih banyak mengandalkan dukungan dari birokrasi pemerintah. Keberadaan kontraktor tersebut dimungkinkan karena Binanga III memang berada di pinggir jalan raya dan termasuk daerah aliran sungai Saddang yang menyimpan banyak sumberdaya alam, berupa batu dan pasir sebagai bahan bangunan.

Sementara itu, kepala kampung yang sebelumnya menjadi Guru juga merupakan aktivis Muhammadiyah. Karena statusnya sebagai PNS, maka secara organisatoris dia keluar dari PAN. Namun pengaruhnya pula, kemudian sejumlah kalangan komunitas muslim di Binanga III mulai banyak yang aktif di Muhammadiyah sekaligus memilih PAN. Padahal sebelumnya, mertuanya yang pensiunan militer dan menjadi kepala kampung selama puluhan tahun, merupakan mobilisation Golkar. Perubahan kepemimpinan di Binanga III, dari militer yang otoriter ke sipil yang partisipatif turut memberi andil perubahan pemilihan dari Golkar ke PAN.

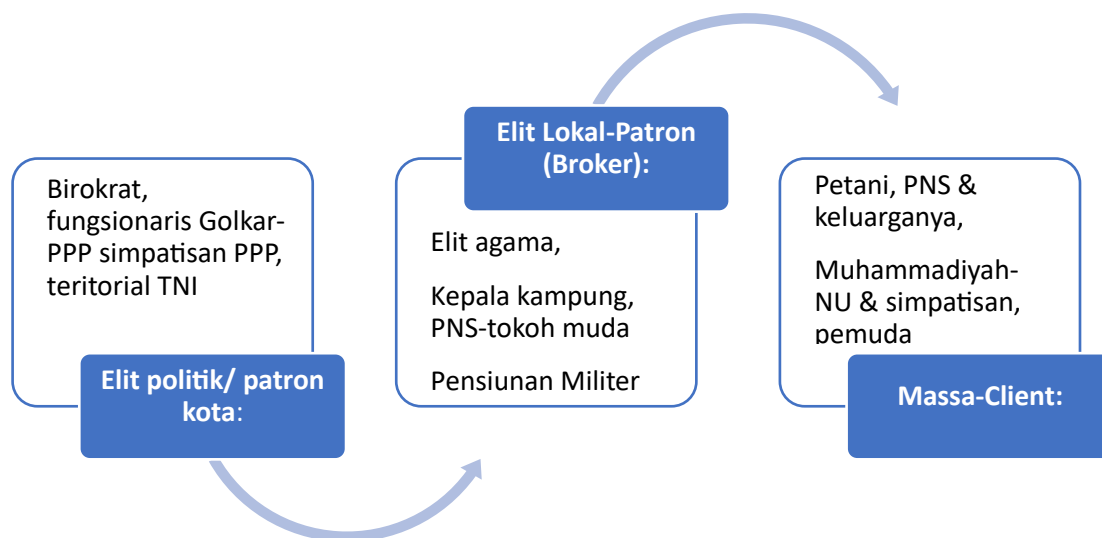
Para birokrat (PNS) dan pengusaha *plat merah* di Binanga III yang menjadi basis utama pendukung Golkar, kemudian mengantarkan kemenangan Golkar dalam pemilu, baik pada masa Orde Baru maupun masa Orde Reformasi. Bagaimanapun juga komunitas muslim ini, selain petani tampaknya bekerja di sektor birokrasi pemerintah menjadi tumpuan utama, mengingat lahan pertanian mereka yang terbatas. Yang menarik bahwa sebagian besar dari PNS tersebut tersebar di berbagai instansi pemerintah. Berbeda dengan Binanga I, dimana sebagian besar warga yang berstatus PNS berasal dari Departemen Agama dan atau guru agama.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa peranan elit dalam memobilisasi massa (komunitas muslim) sangat dominan dan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi politik massa dalam pemilihan umum. Dengan demikian, berlakulah apa yang disebut sebagai politik *patron client*. Sebagai imbalannya, para elit tersebut memberikan jaminan keamanan kepada cliennya, sedang client menerima preferensi politik dari patron. Politik *patron client* ini, terutama berlaku di Binanga II dan Binanga I, karena Kepala kampung yang selama puluhan tahun berkuasa memiliki jaringan luas, termasuk dengan para sindikat pencuri ternak sapi yang sering beroperasi di perkampungan sepanjang sebelah barat Sungai Saddang.

Birokrasi sebagai mesin politik pemerintah orde baru, juga sangat efektif memobilisasi massa untuk mendukung Golkar. Apalagi para birokrat pada masyarakat desa sebagian besar juga merupakan patron tidak hanya bagi keluarga dekat (inti) tetapi juga bagi keluarga jauh (kerabat). Sehingga semakin memperluas jaringan birokrat sebagai instrumen kekuasaan dalam masyarakat di luar dari misi instansinya. Fenomena ini yang memang sudah berlangsung sejak tahun 1971 dan juga sudah menasional dan berlaku hingga di pelosok desa (Gaffar, 1999 dan Kuntowijoyo, 1991).

Jaringan interaksi antara elit politik di kota dengan elit lokal atau para broker dengan massa memiliki sejumlah variasi. Elit birokrasi lebih banyak memanfaatkan PNS dan keluarganya, sedang kepala kampung memanfaatkan keluarga inti, keluarga luas dan sejumlah client dalam mengembangkan pengaruhnya. Sedangkan elit politik versi pensiunan militer, selain ke keluarga inti juga sejumlah client, khususnya yang berlatar belakang sama, sebagai pensiunan militer. Untuk elit agama, ke tokoh agama versi Depag, dan massa santri, beserta keluarga inti dan simpatisannya semuanya sebagai client. Selanjutnya jaringan interaksi elit lokal dengan elit politik kota, termasuk birokrasi dan massa (komunitas muslim) setempat sebagai client dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.

Figure 4. Jaringan interaksi elit politik kota, elit lokal dan massa



Sumber: Diolah dari data Primer, 2002

Dalam gambar tersebut antara elit politik kota dan elit lokal, interaksinya bersifat dua arah (timbang balik), sedang elit lokal dan massa bersifat satu arah, hanya dari elit lokal saja. Dalam posisi ini, elit lokal sebagai *opinion leader* menjadi broker antar elit kota dan massa (Borgatta, 1992). Elit lokal dari pensiunan militer yang sering mencounter kepala kampung dan memata-matai elit agama memanfaatkan jaringan organisasi teritorial TNI, selain dengan pemerintah daerah. Sementara elit agama, selain dengan tokoh agama di kota kabupaten, juga tokoh agama di kota propinsi yang pro partai Islam. Sedangkan penguasa lokal dengan pejabat pemerintah di atasnya. Tampaknya elit lokal pun memiliki agenda politik sendiri yang dapat mencari pembenaran untuk mendukung pilihan politiknya. Pembenaran itu, bersumber dari idiologi pembangunan atau nilai-nilai agama.

4. KESIMPULAN

Praktik demokrasi pada awal reformasi sangat ditentukan oleh peran elit lokal dalam proses sosialisasi dan mobilisasi politik. Elit lokal yang berperan adalah elit birokrasi, kepala kampung, pensiunan TNI, elit agama. Elit birokrasi menggalang dukungan dari PNS dan keluarganya, sedangkan kepala kampung memanfaatkan keluarga dan kliennya. Elit militer, selain keluarga inti juga client. Hasil penelitian menunjukkan elit agama berkolaborasi tokoh agama di kota memanfaatkan sentiment nilai keagamaan massa santri (Usman, 1993).

Interaksi elit politik kota dan elit lokal bersifat timbal balik, sedangkan elit lokal dan massa bersifat satu arah. Jadi, elit lokal sebagai opinion leader menjadi broker antar elit kota dan massa. Temuan lain pola sosialisasi dan mobilisasi politik sangat tergantung pada kepentingan dan afiliasi politik elit. Pada akhir Orde Baru mobilisasi politik ke Partai Pemerintah sangat kuat, sedangkan pada awal reformasi sudah mengalami pergeseran pada partai berbasis agama, walaupun belum sepenuhnya berubah drastis.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kepentingan elit politik kota bersentuhan dengan kepentingan elit lokal (hubungan patron-client) Mappawata (1990), sehingga menguatkan kolaborasi politik walaupun masyarakat sipil harus dikorbankan oleh para patron. Keduanya mempunyai argumentasi atau pembenaran dan sekaligus kepentingan sendiri. Hal ini berarti partisipasi politik komunitas muslim lebih menguntungkan elit, demi mempertahankan kekuasaannya (*status quo*), dari pada massa sebagai pemilik kedaulatan yang diakui konstitusi.

Pemanfaatan institusi agama untuk berelasi dengan massa, baik elit agama (Santri), politik-birokrasi dan militer pada umumnya melalui masjid sebagai pranata utama kehidupan ummat. Hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian Kotler-Berkowitz (2001) tentang agama dan perilaku voting Karena itu, masjid sangat potensial menjadi instrumen mencari dukungan politik dari komunitas santri (Usman, 1993). Namun pada akhir tahun 1990-an, tampaknya pemanfaatan simbolik itu mengalami pergeseran ke aspek kebutuhan lainnya, seperti pembangunan infrastruktur desa.

Isu penting untuk penelitian selanjutnya terutama perubahan struktur sosial masyarakat, khususnya polarisasi elit yang berimplikasi pada perubahan orientasi politik dan pilihan politik komunitas santri. Selanjutnya diperlukan Pendidikan politik (pemilih) yang lebih menguatkan pilihan rasional.

Pengakuan

—

REFERENSI

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta; Bina Aksara.
- Borgatta, Edgar F (editor), 1992, *Encyclopedia of Sociology*, Volume 4. Maxwell Macmillan International. New York-Oxford.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Duverger, Maurice, 2002, *Sosiologi Politik*. Terjemahan Daniel Dhakidae, Jakarta: Rajawali.
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters: a Case Study of Election under a Hegemonie Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford, 1984, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terj. Basari, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Kotler-Berkowitz, Laurence A. 2001. Religion and Voting Behavior in Great Britain: A Reassessment". (The British Journal of Political Science, Vol 31).
- Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi*, Bandung, Mizan.
- Lipset, Seymour Martin, 1995, "The Encyclopedia of Democracy", *Congressional Quarterly*, Volume III dan IV. Washington, D.C.
- Mappawata, Tatjong, 1990, "Hubungan Patron Client". (*Jurnal Tamalanrea*, Edisi pertama, Fisip Unhas).
- Mulkhan, Abd. Munir, 1989, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam, 1965-1987*. Jakarta: Rajawali Press.

- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta, Edisi 7. Indeks.
- Putra, Heddy S. Ahimsa, 1988, *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Gama University Press.
- Taqwa, Ridhah, 2010, "Demokrasi Berbisik dan Transisi Demokrasi: Konflik Politik Dalam Suksesi Elit Lokal", Dalam A. Fajar *Masyarakat Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Diagnosa Institute Press-KAMPS.
- Taqwa, M. Ridhah, 2004, "Perilaku Memilih dan Politik Kepartaian pada Pemilu 1999, Penelitian Di Desa Pinang Kab. Enrekang Sul-Sel". (*Sosiosains*, Vol, 17, Nomer 3, Juli 2004).
- Usman, Sunyoto. 1990. *Pengaruh dan Jaringan Interaksi Elit Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*. (Perpektif No. 4, tahun 1990).
- Usman, Sunyoto, 1993, "Pergeseran Varian Abangan-Santri". *Harian Republika*, 5 Juni, hlm. 5.
- Walinono, Hasan. 1979. *Tanete: Studi Sosiologi Politik*. Disertasi Sosiologi Universitas Hasanuddin.